

Tahun 1966

Berawal dari usaha tekstil di Pasar Klewer Solo oleh le Djie Shien atau Haji Muhammad Lukminto dengan nama UD Sri Redjeki

Tahun 1968

Mendirikan sebuah pabrik di Joyosuran, Solo untuk memproduksi kain mentah dan bahan putihan

Tahun 1978

Nama dan badan usaha UD Sri Redjeki diubah menjadi PT Sri Rejeki Isman

Tahun 1982

Merelokasi dan mendirikan pabrik penenunan pertamanya ke Desa Jetis, Sukoharjo

Tahun 1992

- Diresmikan oleh Presiden Soeharto
- Memperluas pabrik sehingga dapat menampung empat lini produksi sekaligus, yakni pemintalan, penenunan, penyelesaian, dan garmen
- Mulai diminta untuk memproduksi pakaian seragam Polisi dan Tentara Negara Indonesia (TNI)

Tahun 1994

Dipercaya memproduksi seragam militer untuk pasukan militer North Atlantic Treaty Organization (NATO) dan militer Jerman

Sumber:
Berbagai Sumber
Diolah

EDISI KAMIS 22 MEI 2025

H A R I A N

LENTERA

Inspirasi Perubahan

02 GOVERNMENTTODAY
Pembangunan IKN Dilanjutkan, Badan Otorita Dikucuri
Rp 5 T di 2026

04 NUSANTARA
BI Pangkas Poyeksi Ekonomi RI 2025, Kenapa?

10 LISTSTYLE
Gunakan Bahan Alami Ini untuk Basmi Rayap

BOS SRITEX **DITANGKAP** KEJAGUNG HAK MANTAN BURUH **MENGGANTUNG**

Sudah tak terhitung ada berapa babak dalam cerita terguncangnya Sritex (PT Sri Rejeki Isman Tbk). Namun kabar terbaru bisa jadi episode terakhir, usai Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap eks Dirut PT Sritex, Iwan Setiawan Lukminto di Solo. Ada dugaan korupsi pemberian kredit di pabrik tekstil terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara tersebut. Disebutkan, 3 bank pembangunan daerah (BPD) yakni Bank DKI, Bank Jateng, dan Bank Jabar Banten terlibat. Selain itu 1 bank BUMN yakni BNI juga masuk daftar kreditur untuk Sritex. Total nilainya sekitar Rp 3,6 triliun. Kegaduhan di Sritex terjadi sejak Oktober 2024, ketika perusahaan pailit dan berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Kala itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel memastikan bahwa negara hadir usai putusan pailit terhadap Sritex. Namun tampaknya tak terealisasi karena sejak Januari 2025, Sritex melakukan PHK secara bertahap. Hingga akhirnya Sabtu, 1 Maret 2025 resmi menghentikan operasional yang mengakibatkan lebih dari 10 ribu orang kehilangan pekerjaan. Sebelum penangkapan oleh Kejagung sebenarnya sempat tersiar kabar Sritex akan kembalo beroperasi karena ada dua investor masuk. Di sisi lain, penutupan Sritex saat ini masih menyisakan kasus tuntutan hak 8.475 mantan buruh senilai Rp 337 miliar. Akankah nasibnya menggantung?

Baca Hal 11...

Tahun 2013

Resmi menjadi perusahaan terbuka dan menjual sahamnya di Bursa Efek Indonesia

Tahun 2020

Angka penjualan anjlok menjadi US\$ 847,5 juta. Di sisi lain, beban pokok penjualan naik dari US\$ 1,05 miliar menjadi US\$ 1,22 miliar. Akibatnya, Sritex mencatat kerugian untuk pertama kali sejak melantai di pasar modal.

Januari 2022

CV Prima Karya mengajukan PKPU terhadap Sritex yang memiliki utang Rp 26,2 triliun. Sritex sepakat restrukturisasi utang US\$ 344 juta menjadi pinjaman tanpa jaminan selama 12 tahun.

Oktober 2024

PT Indo Bharat Rayon menggugat Sritex karena tak memenuhi kewajiban utang. Pengadilan Niaga Semarang mengabulkan gugatan dan menyatakan Sritex pailit.

Desember 2024

Sritex lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan ditolak. Putusan ini dengan sendirinya membuat status pailit terhadap raksasa tekstil tersebut sah secara hukum atau inkrah.

1 Maret 2025

Sritex resmi tutup usai diputuskan dalam rapat kreditur kepailitan Sritex pada Jumat, 28 Februari 2025. Akibat putusan pailit karyawan yang PHK mencapai 10.665 orang.

JEJAK
RAJA TEKSTIL
SRITEX

IWAN SETIAWAN
LUKMINTO





Kompleks Rumah susun (rusun) ASN dan Hankam yang telah selesai dibangun di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Foto diambil pada 14 Februari 2025.(antara)

Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun anggaran 2026. Ada alokasi dana sebesar Rp 5,05 triliun tahun depan

Dokumen resmi Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada DPR.

Dikatakan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 5,05 triliun. Dana tersebut terdiri atas dua program utama, yakni Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 553 miliar dan Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp 4,49 triliun.

Tak hanya OIKN, porsi belanja infrastruktur untuk IKN juga tercermin dalam alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang mencapai Rp 70 triliun. Anggaran besar tersebut dialokasikan untuk berbagai program prioritas pembangunan infrastruktur.

Rincian anggaran Kementerian PUPR mencakup Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 5,46 triliun, Program Infrastruktur Konektivitas sebesar Rp 29,84 triliun, Program Ketahanan Sumber Daya Air sebesar Rp 18,83 triliun, Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Rp 11,2 miliar, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp 3,26 triliun, serta Program Prasarana Strategis sebesar Rp 13,43 triliun.

Meski tidak dirinci secara eksplisit mana saja program yang diarahkan langsung ke proyek IKN, selama ini proyek pembangunan infrastruktur dan permukiman di kawasan IKN sebagian besar ditangani oleh Kementerian PU, terutama terkait konektivitas jalan, penyediaan air

bersih, dan pembangunan hunian ASN.

Sri Mulyani menyampaikan, belanja negara pada periode 2023 hingga 2025 menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 5,5 persen secara nominal. Untuk tahun anggaran 2024, arah kebijakan belanja difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penguatan ketahanan energi, serta pengembangan sektor-sektor produktif untuk menopang pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

"Realisasi Belanja Negara tahun 2024 terutama dipengaruhi oleh belanja untuk pemberian layanan dasar baik kesehatan maupun pendidikan, penyaluran berbagai program bansos dan subsidi,

Rusun Hampir Rampung, Kapan ASN Pindah?

PT PP (Persero) Tbk menyampaikan progres pembangunan rumah susun (rusun) untuk aparat sipil negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan, telah mencapai 98,14 persen. Proyek senilai Rp 1,87 triliun itu mulai dibangun sejak 25 Agustus 2025.

Corporate Secretary PT PP Joko Raharjo menyatakan, perseroan berkomitmen menghadirkan solusi konstruksi yang inovatif dan berkelanjutan. "Kami bangga dapat menjadi bagian dari pembangunan IKN dengan menghadirkan proyek hunian yang berkualitas dan berkelanjutan bagi para ASN. Dengan berbagai inovasi yang diterapkan, kami yakin proyek ini akan menjadi contoh pembangunan rumah susun modern yang efisien dan ramah lingkungan," ujar Joko dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, dikutip Rabu (20/5/2025).

Joko menjelaskan, proyek ini bertujuan menyediakan hunian yang nyaman dan layak bagi ASN, TNI, dan Polri yang akan bertugas di IKN.

PEMBANGUNAN IKN DILANJUTKAN, BADAN OTORITA DIKUCURI RP 5 T DI 2026

dukungan untuk pelaksanaan Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024, pembangunan infrastruktur termasuk Ibu Kota Negara (IKN) serta kenaikan gaji ASN/TNI/Polri," kata Sri Mulyani dalam dokumen tersebut, dikutip Rabu (21/5/2025).

Ada 6 Investor Swasta

Enam perusahaan swasta menandatangani perjanjian kerja sama untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan total nilai investasi mencapai Rp 3,65 triliun.

Penandatanganan ini berlangsung pada Rabu (21/5/2025) di Kantor Otorita IKN yang baru beroperasi 3 bulan ini di Nusantara.

Keenam perusahaan yang menandatangani kerja sama berasal dari sektor kuliner, perhotelan, pendidikan, ritel, konstruksi, hingga properti komersial dan residensial.

Di bidang kuliner, PT Solusi Harapan Nusantara, yang dikenal melalui brand seperti Bakoel Bamboe dan Katta Coffee & Kitchen, akan

membangun pusat kuliner di atas lahan seluas ±1.800 m².

Sementara itu, PT Makmur Berkah Hotel (MBH), anak usaha dari perusahaan publik PT Makmur Berkah Amanda Tbk yang telah mengelola hotel internasional seperti Element by Westin dan Four Points by Sheraton, akan menghadirkan hotel bintang lima di bawah jaringan Marriott International di atas lahan ±2,04 hektare.

Dari sektor pendidikan, hadir PT Australia Independent School (AIS) Nusantara, yang berpengalaman lebih dari 28 tahun dalam pengelolaan sekolah bertaraf internasional di Jakarta dan Bali. (wid,rls, ant, kcm/dya)

6 Investor Baru Senilai Rp3,65 T di IKN

1. PT Solusi Harapan Nusantara

Bakal membangun pusat kuliner di atas lahan seluas 1.800 meter persegi

2. PT Makmur Berkah Hotel (MBH)

Membangun hotel bintang 5 di bawah jaringan Marriott International di atas lahan 2,04 hektare.

3. PT Australia Independent School (AIS)

Mengembangkan infrastruktur sektor pendidikan berkapasitas 750 siswa dengan kurikulum International Baccalaureate (IB) di lahan seluas 7.900 meter persegi.

4. PT Maxi Nusantara Raya

Membangun supermarket modern lengkap dengan area kuliner atau food & beverage di atas lahan 0,21 hektare.

5. PT Kreasibeton Nusapersada

Mengembangkan apartemen, perkantoran swasta, dan supermarket di lahan seluas 9.342 meter persegi.

6. PT Daya Mulia Turangga

Membangun kawasan perkantoran dan area komersial di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.



proses pemindahan ini selaras dengan prioritas nasional," kata Rini dalam rapat bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (22/4/2025).(din,rls,ist/dya)

GERINDRA: DANA PARPOL IDEALNYA RP 10.000/SUARA

Partai Gerindra mendorong kenaikan dana bantuan untuk partai politik (parpol) dari pemerintah, dari Rp 1.000 menjadi Rp 10.000 per suara. Bila dikabulkan berarti naik 10 kali lipat dibandingkan posisi saat ini.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, usulan kenaikan dana patpil sudah dibahas dan disampaikan ke berbagai pihak, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Waktu itu sempat dibicarakan dari Rp 108 menjadi Rp 10.000, eh, akhirnya jadi Rp 1.000. Namun, sekarang, menurut saya, angka idealnya bisa Rp 10.000," katanya di Kantor DPP Gerindra, Rabu (21/5/2025).

Muzani menjelaskan, angka Rp 10.000 dinilai ideal mengingat besarnya kebutuhan operasional partai. Kebutuhan tersebut meliputi program pengkaderan, pendidikan politik, hingga pembiayaan saksi dan sosialisasi menjelang pemilu.

"Belanja partai politik itu banyak sekali. Setiap partai punya pandangan berbeda-beda, ada yang bilang Rp 10.000, Rp 15.000, bahkan Rp 40.000," jelasnya terkait dana parpol.

Gerindra berkomitmen untuk mendorong usulan ini melalui pembahasan revisi Undang-Undang (RUU) Politik di DPR. Muzani menilai, pembahasan revisi tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum dan kesiapan lebih awal bagi partai politik dalam menghadapi pemilu.

"Kita akan dorong pembicaraan tentang paket undang-undang politik, termasuk revisi UU Politik dan revisi UU Pemilu. Kalau bisa lebih cepat, lebih baik," tegasnya.

Meski belum disampaikan secara resmi ke DPR, usulan ini diperkirakan akan menuai pro dan kontra di publik. Sebagian menilai kenaikan dana parpol dapat mengurangi potensi korupsi dan meningkatkan kualitas demokrasi, tetapi sebagian lainnya mempertanyakan efektivitas penggunaannya.

Gerindra memandang perlunya peningkatan dana parpol untuk mendukung kinerja dan transparansi partai dalam berdemokrasi. Revisi UU Politik akan menjadi instrumen utama dalam mewujudkan gagasan tersebut

diparlemen.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengusulkan agar partai politik diberikan dana besar dari APBN agar tidak ada lagi korupsi yang menyangkut partai politik atau proses politik.

"KPK sudah beberapa kali memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memberikan dana yang besar bagi partai politik," kata Fitroh dalam webinar yang ditayangkan di kanal YouTube KPK pada 15 Mei 2025.

Fitroh mengatakan, penyebab utama dari korupsi adalah mahalnya sistem politik untuk menjadi pejabat, baik dari tingkat desa hingga presiden. Sebab, mengikuti kontestasi politik untuk menduduki jabatan tertentu pasti mengeluarkan modal besar. Oleh karenanya, tidak menutup kemungkinan memiliki pemodal untuk membiayai kontestasi politik.

Minta Diizinkan Berbisnis

Di sisi lain, Ahmad Muzani menilai jika adanya kucuran dana bantuan dari pemerintah sebesar Rp20 miliar untuk partainya masih dirasa cukup. Namun menjelang Pemilu nanti partai pasti membutuhkan dana yang lebih besar.

Untuk itu, Muzani menilai, partai politik bisa memiliki badan usaha atau bisnis sendiri bisa menjadi solusi pendanaan kegiatan partai.

Hal itu disampaikan Muzani usai menerima bantuan dana parpol dari Kemendagri di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Rabu



Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar (kanan) berbincang dengan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani (kiri) pada acara serah terima bantuan keuangan Partai Politik (Parpol) Tahun 2025 dari Kemendagri kepada Partai Gerindra di kantor DPP Gerindra, Jakarta, Rabu (21/5/2025). (ist)

(21/5/2025).

"Karena itu jumlah angka Rp20 miliar tersebut bagi kami sangat penting. Artinya untuk bisa mensupport bagi kegiatan pendidikan kader Partai Gerindra. Yang kedua, memang benar bahwa kalau pada tahun-tahun sekarang mungkin jumlah itu bisa dianggap cukup," kata Ahmad Muzani.

Namun tak bisa dipungkiri, kata dia, mendekati Pemilu pasti parpol membutuhkan dana yang besar. Biasanya hal itu, bisa diatasi dengan urunan dari internal partai.

"Tapi nanti biasanya mendekati pemilihan umum, partai politik memiliki eskalasi politik, eskalasi kegiatan yang lebih meningkat, yang lebih intensif sehingga memerlukan biaya dan dana besar. Sehingga dana tersebut tentu saja, biasanya partai politik mencari sumber-sumber dari internalnya," katanya.

Untuk itu, Muzani mengatakan, pemerintah harus memikirkan lebih lagi tentang sumber-sumber dana bagi partai politik. Misalnya, dengan memperbolehkan partai politik bisa memiliki badan usaha sendiri atau bisa berbisnis.

"Negara bisa memikirkan lebih lagi

tentang sumber-sumber dana bagi partai politik agar partai politik bisa memiliki sumber dana yang dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas," beber Muzani.

"Misalnya, apakah mungkin partai diizinkan untuk memiliki badan usaha partai?," sambungnya.

Memang diakuinya kekinian UU Parpol melarang parpol untuk berbisnis. Namun adanya badan usaha yang dimiliki partai setidaknya bisa menjadi harapan.

"Nah, jika hal tersebut dimungkinkan tentu saja itu bisa menjadi harapan partai politik untuk mencari sumber-sumber perdanaan bagi kegiatan internal," ujarnya.

"Bantuan partai politik yang dinilai cukup atau sumber lain dengan cara memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mencari badan usaha berbisnis adalah ikhtiar atau cara untuk memberi pendanaan bagi partai politik yang lebih cukup untuk memiliki kebutuhannya. Pertanyaannya adalah apakah itu bisa memberi jaminan bagi turunnnya angka penyalahgunaan keuangan bagi partai politik atau korupsi? Tentu saja semua ikhtiar harus dilakukan," sambungnya. (wid,rls,ist,sua/dya)

PDIP Harap Tak Buru-buru

KETUA DPP PDIP Said Abdullah menanggapi usulan agar pemerintah menambah dana partai politik (parpol) dari APBN. Said menilai, melihat kondisi APBN saat ini, maka penerapan usulan itu tak perlu terburu-buru.

"Harapannya saya memang dalam kondisi saat ini melihat dari sisi APBN kita jangan buru-buru. Penerapan jangan buru-buru di internal DPR juga perlu pengkajian yang lebih dalam, ketika kita sudah agak longgar, fiskal kita sudah pada titik tertentu memungkinkan, barulah," ujar Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/5/2026).

Said mengatakan rekomendasi

terkait bantuan partai oleh KPK sudah disampaikan kedua kali. Said mengapresiasi KPK yang menyuarakan pendanaan partai politik menggunakan APBN.

"Kalau rekomendasi KPK nampaknya ini yang kedua karena dulu KPK juga pernah ngusulin ke kami, bukan ke kami, juga ke pemerintah DPR yang layak untuk partai politik," ujar Said.

"Nah sekarang KPK mengulangi lagi memberikan penekanan dengan diksi yang lebih kuat agar pendanaan parpol sebisa mungkin sesuai kemampuan keuangan negara seharusnya ditanggung oleh pemerintah. Nah saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh KPK,"

sambungnya.

Kendati demikian, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu menilai usulan KPK tak akan berjalan jika partai politik tak berbenah. Said melihat hal ini sebagai tantangan untuk partai politik ke depannya.

"Betul, setuju (untuk menekan tindakan korupsi) memang harus begitu kan, harus untuk apa sih dana bantuan politik ditambah kalau dari sisi behavior tidak berubah?" kata Said.

"Kan ada yang mau disasar, ada target, oleh karenanya memang menjadi tantangan tersendiri bagi setiap partai politik untuk segera berbenah," tambahnya. (pra,ist/dya)

BI PANGKAS POYEKSI EKONOMI RI 2025, KENAPA?

Bank Indonesia (BI) memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi nasional pada rentang 4,6-5,4% selama 2025. Angka ini lebih rendah dari perkiraan sebelumnya yang sebesar 4,7-5,5%.

Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional 2025 sebesar 5% atau titik tengah dari rentang 4,6-5,4%.

Menurut Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo proyeksi tersebut masih terbilang baik, apalagi dibandingkan negara lain.

"BI memperkirakan pertumbuhan 4,6-5,4% sedikit lebih rendah dari perkiraan sebelumnya 4,7-5,5%," ungkap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers, Rabu (21/5/2025).

Ekonomi nasional dalam tiga bulan pertama tahun ini tumbuh 4,87%, lebih rendah dari tahun sebelumnya padahal ada aktivitas lebaran yang seharusnya bisa memicu gerak ekonomi.

Menurut Perry, pada kuartal II sejumlah indikator perekonomian mulai mengarah pada perbaikan. Dalam sisa tahun ke depan, ekonomi akan didorong oleh permintaan domestik dan kenaikan belanja pemerintah.

"Berbagai respons kebijakan diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam kaitan ini bauran kebijakan moneter, makropurudential, kecepatan digitalisasi disinergikan termasuk dukungan implementasi program astacita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi," paparnya.

Sementara negara tetangga seperti Malaysia hanya tumbuh 4,4% dan Singapura hanya 3,8% pada kuartal pertama 2025.

"Pertumbuhan ekonomi yang patut kita syukuri di tengah negara-negara lain yang mengalami koreksi pertumbuhan yang lebih tinggi, lebih besar dari Indonesia," ujar Perry.

BI Rate Turun

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo juga mendorong perbankan untuk segera menyesuaikan suku bunga kredit seiring dengan penurunan BI rate.

Sebagai informasi, BI telah



Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo

menurunkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin dari 5,75 persen menjadi 5,50 persen pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Mei 2025. "Yang perlu kita dorong adalah di perbankannya ke sektor riil, suku bunga depositonya dan juga pendanaannya perlu kita perluas dan terutama itu juga suku bunga kredit," katanya.

BI mencatat suku bunga perbankan masih tetap relatif tinggi. Padahal, pada Januari lalu, BI telah menurunkan BI rate sebesar 25 bps dari 6 persen menjadi 5,75 persen, dan besaran BI rate itu tidak berubah sampai April 2025.

Namun, pada April 2025, suku bunga deposito 1 bulan tercatat 4,83 persen, meningkat dari 4,81 persen pada awal Januari 2025. Sejumlah bank juga cenderung menawarkan suku bunga deposito yang lebih tinggi

dari yang dipublikasikan.

Sementara itu, suku bunga kredit perbankan juga masih relatif tinggi, yaitu tercatat sebesar 9,19 persen pada April 2025, hanya turun tipis dibandingkan dengan 9,20 persen pada awal Januari 2025.

Oleh karenanya, BI menilai suku bunga bank perlu diturunkan untuk mendorong peningkatan penyaluran kredit guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

BI mencatat, kredit pada April 2025 tumbuh sebesar 8,88 persen secara tahunan, lebih rendah dari 9,16 persen pada Maret 2025.

Dari sisi penawaran, minat penyaluran kredit oleh bank (lending standard) masih baik, terutama pada sektor pertanian, LGA (Listrik, Gas, dan Air), dan jasa sosial.

Selain itu, kondisi likuiditas

perbankan secara umum masih memadai, namun pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) cenderung melambat dari 5,51 persen pada awal Januari 2025 menjadi 4,55 persen pada April 2025. Kondisi ini mendorong persaingan dalam pendanaan antar bank dan perlunya memperluas sumber pendanaan lainnya di luar DPK. (wid,rls,ant/dya)

PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK BRUTO (2023-2025)

TW I-2025

4.87%

TW IV-2024

5.04%

TW III-2024

4.95%

TW II-2024

5.05%

TW I-2024

5.11%

TW IV-2023

5.04%

TW III-2023

4.94%

TW II-2023

5.17%

TW I-2023

5.04%

(Per 05 Mei 2025)

Modal Asing US\$3,1 Miliar Keluar

BANK Indonesia (BI) melaporkan data kumulatif triwulan II 2025 sampai 19 Mei 2025 menunjukkan aliran modal keluar secara bersih atau net outflows sebesar US\$3,1 miliar. Hal ini diklaim menunjukkan perkembangan positif setelah pada April 2025 investasi portofolio mencatat net outflows yang lebih besar.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyebutkan memasuki periode kuartal II 2025, aliran masuk investasi portofolio pada Mei kembali meningkat, terutama ke surat berharga negara (SBN) dan saham. Ini sejalan dengan meredanya ketidakpastian global serta tetap baiknya prospek perekonomian Indonesia.

"Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tetap terjaga, dengan aliran

masuk investasi portofolio yang kembali meningkat pada Mei 2025 sehingga mendukung ketahanan eksternal," ujar Perry.

Bank Indonesia memprediksi NPI 2025 tetap baik ditopang defisit transaksi berjalan yang rendah dalam kisaran defisit 0,5%-1,3% terhadap produk domestik bruto (PDB), serta surplus transaksi modal dan finansial yang berlanjut, di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

Posisi cadangan devisa pada akhir April 2025 tercatat sebesar US\$152,5 miliar, setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Pada kuartal I 2025, defisit

transaksi berjalan diperkirakan tetap rendah ditopang oleh surplus neraca perdagangan barang, terutama non-migas.

Kinerja transaksi modal dan finansial juga diperkirakan tetap terkendali, didukung oleh investasi langsung yang surplus serta investasi portofolio yang meningkat, seiring terjaganya persepsi positif investor terhadap prospek ekonomi domestik. (wid,rls,ist/dya)

Inovasi Disnakkan Kabupaten Blitar Dukung Program Ketahanan Pangan Nasional

BLITAR - Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnaskan) Kabupaten Blitar, terus melakukan inovasi sebagai upaya mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional bidang peternakan yang menjadi prioritas Presiden RI, Prabowo Subianto.

Kepala Disnaskan Kabupaten Blitar, Eko Susanto menyampaikan ada beberapa program dan inovasi yang sudah dilakukan pihaknya, untuk mendukung Program Ketahanan Pangan bidang peternakan dan perikanan.

"Secara umum, kondisi peternakan dan perikanan di Kabupaten Blitar baik. Namun, beberapa inovasi tetap terus dilakukan, terutama untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah pusat," ujar Eko.

Karena dari sisi populasi dan produktifitas pertanian maupun perikanan di Kabupaten Blitar, dijelaskan Eko sudah bisa memenuhi kebutuhan daerah sendiri.

"Sehingga terkait ketahanan pangan terutama kebutuhan protein, dari peternakan dan perikanan Kabupaten merupakan daerah penyangga yang berkontribusi memenuhi kebutuhan nasional," jelasnya.

Seperti kebutuhan telur ayam nasional dan susu, Kabupaten Blitar justru mensuplai ke luar daerah. Termasuk daging, ayam, itik, ikan air tawar, dan air laut juga menjadi pemasok ke daerah lain.



Bupati Blitar, Rijanto (tengah) didampingi Kadisnaskan Kab. Blitar, Eko Susanto (batik merah) saat pelepasan ekspor perdana pakan konsentrat ruminansia ke Brunei.

Sesuai data terakhir tahun 2024 di Kabupaten Blitar, jumlah populasi ayam sekitar 16,8 juta ekor, Kabupaten Blitar bisa memproduksi 158,3 ribu ton telur setahun. Sementara untuk populasi sapi perah 21,6 ribu ekor, dengan produksi susu sekitar 40,5 juta ton susu per tahunnya.

Diungkapkan Eko selain Kabupaten Blitar penopang sekitar 30 persen kebutuhan telur nasional, juga sudah bekerjasama atau MoU dengan beberapa daerah diantaranya Surabaya, Probolinggo, Yogyakarta, Bantul, Bojonegoro dan Banjarmasin.

"Untuk memasok komoditas dari Kabupaten Blitar, seperti telur, ayam, ikan dan yang terbaru kambing," paparnya.

Sedangkan beberapa inovasi dari

Disnaskan Kabupaten Blitar, untuk mendukung ketahanan pangan nasional yakni Bussiness Tour Pelaku Usaha Peternakan dan Perikanan. Forum strategis untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha, dan perekonomian daerah.

"Tujuan dari Bussiness Tour adalah membangun komunikasi dan jejaring dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perbankan, pemerintah daerah, dunia usaha, serta akses-akses pasar," kata Eko.

Kemudian lanjut Eko kalau saat ini pihaknya mendorong inovasi untuk meningkatkan produktifitas, kualitas produk dan pemasaran.

Terbaru, inovasi fasilitasi ekspor, produk peternakan dan perikanan ke negara-negara yang bisa menjadi pasar baru.

"Ini inovasi baru dengan dukungan dari Dirjen PKH Kementan RI, ada sekitar 5-7 farm yang diusulkan dan akan dilakukan verifikasi sesuai dengan pangsa pasar dan buyer di luar negeri," tandasnya

Nantinya lanjut Eko, akan dilakukan pendampingan, untuk memenuhi syarat dari buyer misal ada label omega, organik dan label lainnya.

Beberapa waktu lalu, juga dilakukan ekspor perdana konsentrat ruminansia atau produk pakan produksi dari Kabupaten Blitar ke Brunei.

Ditambahkan Eko agar potensi telur Kabupaten Blitar tetap bisa bersaing, baik di pasar nasional maupun internasional. Didorong adanya inovasi varian telur ayam baru, seperti telur omega, telur organik dan telur cage free.

"Yaitu telur ayam yang tidak dipelihara di kandang, tapi dilepas di area tertentu dengan pakan yang lebih bagus. Sehingga kualitas telurnya berbeda, mirip dengan telur omega. Jenis telur seperti ini yang banyak diminati pasar luar negeri," imbuhnya.

Sektor peternakan dan perikanan di Kabupaten Blitar, memberikan kontribusi pada PDRB sekitar 15 persen. Bahkan nilai investasi masyarakat termasuk pengusaha bidang peternakan dan perikanan, belum termasuk kandang serta peralatan totalnya mencapai sekitar Rp 7 triliun pungkasnya. (* /Ais/Dya)

Hari ke-21, Lebih dari 135 Ribu Jamaah Indonesia Sudah di Arab Saudi

Jakarta - Sebanyak 135.093 jamaah haji Indonesia dari 347 kelompok terbang (kloter) telah tiba di Tanah Suci pada operasional ibadah haji 1446 H/2025 M yang memasuki hari ke-21 atau per Rabu (21/5/2025) pukul 06.00 Waktu Arab Saudi (10.00 WIB).

Dari total tersebut, 29.449 di antaranya adalah jamaah lansia. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Akhmad Fauzin, dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta.

"Seiring dengan kedatangan

jamaah yang terus berlangsung, saat ini jamaah mulai banyak beraktivitas di Kota Makkah. Hingga pagi ini, sebanyak 100.440 jamaah haji Indonesia sudah berada di Makkah untuk melaksanakan rangkaian ibadah, termasuk umrah wajib dan ibadah-ibadah sunnah lainnya," jelas Fauzin dikutip dari laman resmi Kemenag, Rabu (21/5/2025).

Pemerintah kembali mengimbau jamaah untuk menjaga kondisi fisik dan membatasi aktivitas di luar ruangan mengingat cuaca di Arab Saudi saat ini panas. "Suhu di Makkah saat ini berkisar antara 39 hingga 43

derajat Celsius pada siang hari, dan tetap hangat di malam hari. Cuaca panas ini bisa berdampak serius pada kesehatan, khususnya bagi lansia dan jamaah yang memiliki penyakit penyerta," ungkap Fauzin.

Selain itu, PPIH mengimbau jamaah untuk selalu menggunakan pelindung kepala, membawa air minum, serta menghindari aktivitas fisik berlebihan. Jamaah juga diminta memanfaatkan alat pelindung diri seperti payung, topi, dan semprotan air untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil.

Kesiagaan tim kesehatan dan petugas kloter terus dilakukan untuk

mendampingi dan melayani jamaah di lapangan. Jika mengalami gangguan kesehatan, jamaah diimbau segera melapor ke petugas kloter atau tenaga medis.

Dalam kesempatan itu, Fauzin juga menyampaikan kabar duka bahwa hingga hari ke-21 operasional haji, tercatat 35 jamaah haji wafat, terdiri dari 26 laki-laki dan 9 perempuan.

"K a m i m e n g u c a p k a n belasungkawa sedalam-dalamnya. Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah mereka dan menempatkan mereka dalam surga-Nya," kata Fauzin. (wid,rls/dya)

Soroti Dugaan Limbah Medis di TPA Supit Urang DPRD Minta DLH Kota Malang Bentuk Pengawas



sudah menerima audiensi warga atas indikasi temuan limbah medis di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Supit Urang yang sudah dilaporkan beberapa waktu yang lalu," ujar Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi, Rabu (21/5/2025).

DPRD menilai persoalan ini tidak hanya perlu diselesaikan melalui jalur hukum, seperti yang tengah berproses saat ini. Namun juga harus ditindaklanjuti dari sisi kebijakan dan tata kelola pengelolaan sampah.

"Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Tetapi kami juga merekomendasikan, mendorong pembentukan PPLH yang

memiliki kewenangan semacam PPNS agar ada pengawasan dan tindakan yang efektif," kata Dito.

Menurutnya, dari penelusuran DPRD, terdapat sekitar 75 fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) di Kota Malang, baik milik swasta maupun pemerintah, yang menjadi penghasil limbah medis.

Namun, DLH Kota Malang disebut memiliki keterbatasan kewenangan dalam melakukan pengawasan maupun penindakan terhadap puluhan fasyankes tersebut.

"DLH menyampaikan, pengawasan terhadap seluruh fasyankes ini sulit dilakukan. Karena kewenangan pelaporan limbah ada di tingkat pusat, melalui aplikasi Kementerian Lingkungan Hidup. Celah ini yang bisa dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab," lanjutnya.

Legislatif juga menemukan potensi kebocoran lain, yakni dari limbah medis pasien rawat jalan yang bisa saja ikut terbuang ke tempat sampah umum dan berakhir di TPA. Meski skalanya kecil, hal ini tetap menjadi perhatian karena di luar jangkauan

pengawasan DLH.

"Kami juga sudah mempertanyakan dokumen lingkungan dari masing-masing fasyankes. DLH menyampaikan semuanya punya dokumen, tapi kami ingin mendalami kembali apakah dokumen tersebut sesuai peruntukan, izinnya masih berlaku, dan sebagainya," kata Dito.

Ia menegaskan kembali, rekomendasi pembentukan PPLH akan dituangkan secara resmi dalam waktu dekat. Menurut Dito, kekosongan pengawasan dan lemahnya koordinasi antar lembaga menjadi penyebab utama munculnya dugaan pembuangan limbah medis secara ilegal.

Sementara itu, Kepala DLH Kota Malang, Noer Rahman Widjaya, mengonfirmasi pihaknya telah diperiksa oleh kepolisian terkait dugaan temuan limbah medis di TPA Supit Urang.

Pemeriksaan dilakukan terhadap sejumlah pihak, termasuk dirinya, Kepala Bidang Pengangkutan Sampah, Kepala UPT TPA, hingga petugas kebersihan dan pelaku usaha terkait. (Santi/Dya)

MALANG- DPRD Kota Malang meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat membentuk Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH). Hal ini sebagai upaya memperkuat pengawasan dan penindakan pelanggaran lingkungan. Terutama terkait temuan dugaan limbah medis di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Supit Urang.

"Senin (19/5/2025) kemarin kami

DBHCHT untuk Kesejahteraan Masyarakat Pemkab Malang Gelontorkan Rp57 Miliar

MALANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menggenjot sosialisasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) melalui podcast radio. Kali ini, bidang kesejahteraan masyarakat (Kesmas) menjadi fokus sosialisasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp57 miliar.

Kepala DTPHP Kabupaten Malang, Avicenna Medisica, menjelaskan dari total dana DBHCHT sebesar Rp158 miliar yang diterima Pemkab Malang pada tahun ini. Sekitar Rp57,1 miliar diantaranya dialokasikan untuk bidang kesejahteraan masyarakat. Khusus untuk sektor pertanian tembakau, DTPHP menerima alokasi Rp19,7 miliar.

"Anggaran itu kami gunakan untuk mendukung produksi tembakau di Kabupaten Malang. Tahun ini, luas lahan tembakau diperkirakan mencapai 900 hektare, naik dari sekitar 800 hektare pada tahun lalu," ujar Avicenna, salah satu pemateri dalam podcast tersebut, Rabu (21/5/2025).

Dijelaskannya, produktivitas dari

lahan tembakau di wilayah Kabupaten Malang cukup tinggi. Dengan rata-rata mencapai 10 ton per hektare setiap musim tanam.

Namun, ia mengatakan tembakau hanya bisa ditanam satu musim, yakni musim gadon atau musim transisi antara hujan dan kemarau.

"Risiko utamanya adalah hujan sebelum panen. Oleh karena itu, kami mendorong diversifikasi lahan agar petani tidak hanya bergantung pada tembakau, tapi bisa menanam tanaman lain seperti cabai atau jagung di musim berikutnya," tambahnya.

Lebih lanjut, Avicenna juga menyampaikan terkait penyaluran hasil panen tembakau. Menurutnya, perlu kolaborasi lebih erat dengan industri rokok lokal. Karena selama ini, pabrik rokok yang ada di Kabupaten Malang belum maksimal dalam menyerap hasil panen petani lokal.

"Ini kan perlu dioptimalkan agar petani kita gak perlu menjual produksinya jauh-jauh. Ini yang sedang kami kolaborasikan ke depan," katanya.

Sementara itu, Pemeriksa Bea Cukai Ahli Pertama dari Kantor Bea Cukai Tipe Madya Malang, Agnita Aditya Wardani, menyatakan sosialisasi kali ini berfokus pada penggunaan DBHCHT di sektor kesejahteraan masyarakat. Yang juga bersinggungan dengan produksi bahan baku tembakau.

"DTPHP merupakan salah satu OPD pengampu yang mendukung peningkatan kualitas bahan baku tembakau. Kami terus menguatkan sinergi data, seperti jumlah petani, produsen, hingga tenaga kerja luring agar pemanfaatan dana tepat sasaran," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Mahrus Ali, menilai DBHCHT memiliki peran signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Salah satu contohnya, yakni pembangunan dan perbaikan jalan akses pertanian tembakau yang tidak tercover APBD justru bisa dibiayai dari DBHCHT.

"Sudah banyak jalan yang diperbaiki dari dana DBHCHT, terutama di kawasan pertanian tembakau. Ini jelas sangat membantu masyarakat," ungkap Mahrus. (Santi/Dya)

Gegara Beras, Menteri Jepang Lepas Jabatan

Menteri Pertanian Jepang, Taku Eto, resmi mengundurkan diri pada Rabu (21/5/2025) usai pernyataannya tentang 'tidak pernah membeli beras' memicu reaksi keras dari masyarakat.

Dalam sebuah pertemuan akhir pekan lalu, Taku Eto menyatakan bahwa dirinya "tidak pernah membeli beras secara pribadi karena para pendukungnya memberinya sumbangan dalam jumlah besar, sehingga ia bisa menjual beras tersebut."

Komentarnya itu membuat publik Jepang geram karena saat ini negara tersebut tengah mengalami kelangkaan beras, yang telah menyebabkan harga bahan beras melonjak. Bulan lalu, harga bahan pokok tersebut hampir dua kali lipat dari harga pada April 2024.

Faktor-faktor penyebab kenaikan harga beras termasuk panen yang buruk karena cuaca panas pada tahun 2023, dan pembelian panik (panic-buying) yang dipicu oleh peringatan



Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang Taku Eto berbicara kepada media setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Shigeru Ishiba terkait komentar kontroversialnya tentang penerimaan beras gratis dari para pendukungnya. (Foto: Reuters)

"gempa besar" tahun lalu, serta lonjakan pariwisata.

Pemerintah terpaksa melepaskan sebagian cadangan beras daruratnya dalam upaya untuk menurunkan harga. Namun, sejauh ini belum berhasil.

Komentar Eto dikritik sebagai "sangat tidak pantas, tidak masuk akal, dan tidak dapat ditoleransi" oleh Junya Ogawa, sekretaris jenderal oposisi utama Partai Demokrat Konstitusional Jepang.

Perdana Menteri Shigeru Ishiba, yang peringkat pollingnya buruk karena sebagian disebabkan oleh

harga pangan yang tinggi, juga mengecam menteri tersebut. Dia menyebut pernyataan Eto "sangat disayangkan".

"Tugas menteri pertanian sekarang adalah memberikan solusi untuk harga beras yang melambung. Saya berharap dia menawarkan solusi," kata Ishiba kepada wartawan pada hari Selasa (20/5/2025).

Partai oposisi dilaporkan mengancam akan mengajukan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan Ishiba, yang akan menghadapi pemilihan majelis tinggi yang sulit pada bulan Juli mendatang.

Pada hari Senin lalu, Eto berusaha menarik kembali ucapannya, dengan mengatakan bahwa dia telah melebihi-lebihkan dan telah dikoreksi oleh istrinya.

"Dia mengatakan kepada saya bahwa dia pun membeli beras ketika persediaan beras sumbangan kami habis," kata Eto, seraya menambahkan "ini bukan berarti keluarga kami hidup sepenuhnya dari beras yang diberikan kepada kami".

Diketahui pada hari Rabu (21/5/2025) pagi waktu setempat, Eto menyerah. Dia mengatakan kepada wartawan bahwa dia telah mengajukan pengunduran dirinya setelah "kata-kata yang sangat keras" dari perdana menteri.

Ishiba kemudian mengatakan dalam sidang majelis tinggi bahwa ia "menyetujui pengunduran dirinya dari sudut pandang bahwa kebijakan pertanian tidak dapat berhenti berfungsi."

"Saya minta maaf kepada rakyat Jepang karena saya bertanggung jawab mengangkatnya," kata Ishiba.

Sebagai penerus Eto, Ishiba menunjuk Shinjiro Koizumi, mantan menteri lingkungan hidup yang merupakan putra mantan perdana menteri Junichiro Koizumi. (cnn, the guardian, ist/nei)

Ekspor Tersendat, Efek Tarif Trump Mulai Terasa

Laju pertumbuhan ekspor melambat drastis seiring dengan agresivitas Amerika Serikat dalam memperluas kebijakan tarif, memicu kekhawatiran akan perlambatan ekonomi yang sudah menunjukkan tanda kontraksi bahkan sebelum tarif diberlakukan.

Dikutip dari Bloomberg, Rabu (21/5/2025), Kementerian Keuangan melaporkan bahwa ekspor pada April mengalami kenaikan tahunan (YoY) sebesar 2%, melambat dibandingkan pertumbuhan 4% pada bulan sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh gangguan dalam pengiriman mobil dan baja. Di sisi lain, impor tercatat turun 2,2% YoY akibat merosotnya pembelian batu bara dan minyak mentah.

Komentarnya itu membuat publik Jepang geram karena saat ini negara

tersebut tengah mengalami kelangkaan beras, yang telah menyebabkan harga bahan beras melonjak. Bulan lalu, harga bahan pokok tersebut hampir dua kali lipat dari harga pada April 2024.

Faktor-faktor penyebab kenaikan harga beras termasuk panen yang buruk karena cuaca panas pada tahun 2023, dan pembelian panik (panic-buying) yang dipicu oleh peringatan "gempa besar" tahun lalu, serta lonjakan pariwisata.

Pemerintah terpaksa melepaskan sebagian cadangan beras daruratnya dalam upaya untuk menurunkan harga. Namun, sejauh ini belum berhasil.

Komentar Eto dikritik sebagai "sangat tidak pantas, tidak masuk akal, dan tidak dapat ditoleransi" oleh Junya Ogawa, sekretaris jenderal oposisi utama Partai Demokrat Konstitusional Jepang.

Perdana Menteri Shigeru Ishiba, yang peringkat pollingnya buruk karena sebagian disebabkan oleh harga pangan yang tinggi, juga mengecam menteri tersebut. Dia menyebut pernyataan Eto "sangat disayangkan".



Kapal tanker gas alam cair (LNG) Sohshu Maru mendekati Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Futtsu milik Jera Co, yang tidak terlihat, di Futtsu, Prefektur Chiba, Jepang, pada hari Jumat, 17 Desember 2021. (Bloomberg)

"Tugas menteri pertanian sekarang adalah memberikan solusi untuk harga beras yang melambung. Saya berharap dia menawarkan solusi," kata Ishiba kepada wartawan pada hari Selasa (20/5/2025).

Partai oposisi dilaporkan mengancam akan mengajukan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan Ishiba, yang akan menghadapi pemilihan majelis tinggi yang sulit pada bulan Juli mendatang.

Pada hari Senin lalu, Eto berusaha menarik kembali ucapannya, dengan mengatakan bahwa dia telah melebihi-lebihkan dan telah dikoreksi oleh istrinya.

"Dia mengatakan kepada saya bahwa dia pun membeli beras ketika persediaan beras sumbangan kami habis," kata Eto, seraya menambahkan "ini bukan berarti keluarga kami hidup sepenuhnya dari beras yang diberikan kepada kami". (cnn, the guardian, ist/nei)

Mengenal Anoreksia, Penyakit Mental Paling Mematikan

Saat membicarakan gangguan kesehatan mental dengan risiko kematian tertinggi, banyak orang mungkin langsung teringat pada depresi, skizofrenia, atau gangguan bipolar. Namun, berbagai studi mengungkapkan bahwa gangguan makan, terutama anoreksia nervosa, justru memiliki angka kematian tertinggi dibandingkan jenis gangguan mental lainnya.

Dikutip dari laman Eating Disorder Hope, gangguan makan, yang mencakup anoreksia nervosa, bulimia nervosa, dan binge eating disorder, merupakan jenis gangguan kesehatan mental dengan risiko kematian paling tinggi. Setiap 62 menit terdapat setidaknya satu individu yang meninggal dunia akibat gangguan makan.

Di antara jenis gangguan makan yang ada, anoreksia nervosa adalah yang paling mematikan. Selain itu, sekitar 20 persen dari penderita anoreksia yang meninggal diketahui mengakhiri hidupnya melalui tindakan bunuh diri.

Definisi dan Karakteristik Anoreksia Nervosa

Dikutip dari laman Amen Clinics, anoreksia nervosa adalah gangguan makan yang ditandai oleh persepsi tubuh yang tidak realistis, yang mana penderita memiliki pandangan yang keliru terhadap bentuk tubuh mereka. Individu dengan kondisi ini sering kali merasa dirinya kelebihan berat badan, meskipun secara medis mereka berada dalam kondisi berat badan yang sangat rendah atau bahkan di bawah standar yang sehat. Rasa takut yang berlebihan terhadap kenaikan berat badan mendorong mereka untuk secara ekstrem membatasi asupan makanan. Di Amerika Serikat, diperkirakan sekitar 30 juta orang mengalami gangguan makan dalam satu fase kehidupan mereka, dan sekitar 0,9 persen perempuan dilaporkan menderita anoreksia nervosa. Meski

prevalensi kasus pada laki-laki tercatat lebih rendah, mereka tetap berisiko mengalami gangguan ini.

Dampak Anoreksia terhadap Fungsi Fisik dan Kognitif

Salah satu alasan mengapa anoreksia nervosa tergolong sebagai gangguan yang serius adalah karena dampaknya tidak hanya terbatas pada aspek psikologis, melainkan juga secara signifikan mempengaruhi kondisi fisik dan fungsi kognitif penderitanya. Pembatasan makanan yang ekstrem mengakibatkan tubuh berada dalam kondisi kelaparan kronis yang dapat merusak berbagai sistem tubuh.

Secara medis, kondisi ini dapat mengganggu fungsi sistem kardiovaskular, memperberat kerja sistem pencernaan, serta mengganggu produksi hormon di dalam tubuh. Selain itu, otak juga terdampak akibat kurangnya asupan kalori.

Meski otak hanya mewakili sekitar dua persen dari total berat tubuh, organ ini membutuhkan 20-30 persen kalori yang dikonsumsi dan sekitar 20 persen dari total

aliran darah serta oksigen tubuh untuk berfungsi secara optimal. Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, fungsi otak akan terganggu.

Penderita anoreksia nervosa mengalami penurunan volume gray matter di otak, yang berkaitan dengan penurunan kemampuan kognitif. Studi pencitraan otak pada perempuan penderita anoreksia yang mengalami amenore (berhentinya siklus menstruasi) juga menunjukkan adanya penurunan fungsi kognitif di beberapa area otak.

Selain gangguan fisik, banyak penderita anoreksia juga mengalami gangguan mental lainnya. Sekitar 50 persen penderita dilaporkan mengalami gangguan kecemasan, seperti obsessive compulsive disorder (OCD) atau fobia sosial. Depresi juga umum ditemukan pada 33-50 persen individu dengan kondisi ini. Tidak jarang, penderita juga mengalami gangguan stres pascatrauma (PTSD) dan penyalahgunaan zat.

Gejala yang Dapat Diamati

Gejala anoreksia nervosa terbagi dalam tiga kategori utama, yakni gejala fisik, gejala emosional, dan gejala perilaku. Secara fisik, penderita dapat menunjukkan penurunan berat badan yang signifikan, kelelahan yang berkepanjangan, gangguan tidur, kulit yang kering atau menguning, hingga gangguan pada sistem reproduksi seperti tidak terjadinya menstruasi. Selain itu, gejala lain yang umum meliputi rambut rontok, tekanan darah rendah, detak jantung yang tidak teratur, serta intoleransi terhadap suhu dingin.

Di sisi emosional dan perilaku, penderita sering kali menunjukkan kecenderungan

untuk membatasi asupan makanan secara ketat, baik melalui diet ketat, puasa, maupun olahraga yang berlebihan. Beberapa individu juga melakukan tindakan seperti memuntahkan makanan secara sengaja, menggunakan obat pencahar, atau produk penurunan berat badan. Tidak jarang pula penderita terlihat sangat terobsesi pada makanan, misalnya dengan menyiapkan makanan untuk orang lain tanpa ikut mengonsumsinya.

Faktor Penyebab Anoreksia Nervosa

Hingga saat ini, penyebab pasti dari anoreksia nervosa belum sepenuhnya dipahami. Tetapi sebagian besar ahli sepakat bahwa kondisi ini muncul akibat interaksi antara berbagai faktor, termasuk faktor genetik, psikologis, dan lingkungan sosial.

Secara genetik, penelitian menunjukkan bahwa sekitar 50 hingga 80 persen risiko gangguan makan dapat diturunkan. Seseorang yang memiliki anggota keluarga dekat dengan riwayat gangguan makan memiliki kemungkinan 10 kali lebih besar untuk mengalami kondisi serupa. Selain itu, perubahan pada zat kimia di otak seperti serotonin dan dopamin diyakini turut mempengaruhi nafsu makan, suasana hati, serta kontrol impuls.

Dari sisi psikologis, beberapa individu mungkin mengembangkan gangguan makan sebagai mekanisme koping terhadap trauma emosional. Pengalaman seperti kekerasan fisik atau pelecehan seksual diyakini dapat memicu gangguan makan sebagai bentuk kontrol terhadap situasi yang dirasa tidak terkendali.

Faktor lingkungan dan budaya juga berperan penting, terutama dalam masyarakat yang mengidealkan bentuk tubuh tertentu, umumnya tubuh yang sangat kurus. Standar kecantikan yang tidak realistis ini dapat menimbulkan tekanan sosial, (ne,ist/dya)



Jepang Manfaatkan AI untuk Bantu Temukan Barang

Perusahaan transportasi umum dan berbagai entitas lain di Jepang mulai memanfaatkan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk mengelompokkan dan membuat katalog barang-barang yang dilaporkan hilang, serta menyediakan informasi mengenai lokasi pengembaliannya.

Dalam laporan Kyodo News pada 8 Mei 2025, disebutkan bahwa sekitar

30 organisasi telah mulai menggunakan platform pencarian barang hilang dan ditemukan yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi informasi Find Inc., yang berbasis di Tokyo, di lebih dari 2.300 stasiun dan lokasi lainnya.

Find meluncurkan platformnya pada Juni 2023. Perusahaan ini hingga akhir Maret 2025 telah menangani total sekitar 1,5 juta laporan barang hilang dan sekitar 480.000 di antaranya telah dikembalikan.

"Sampai saat ini orang-orang yang kehilangan barang-barangnya harus memeriksa berbagai tempat melalui telepon," kata Ryu Wada, pemimpin eksekutif perusahaan tersebut.

"Seiring dengan semakin banyaknya fasilitas yang menggunakan layanan ini, penanganan laporan barang-barang yang hilang dan ditemukan akan menjadi lebih mudah karena pertanyaan dapat dicocokkan melalui basis data yang sangat besar," ia menjelaskan.

Pengguna platform Find mencakup Biro Transportasi Kota Sapporo dan bandara Haneda di Tokyo serta kepolisian Tokyo dan kepolisian prefektur Oita.

Operator kereta api yang ber-kantor pusat di Tokyo, Keio Corp., juga meng-
g u n a k a n

sistem tersebut, dan menyaksikan tingkat pengembalian barang yang hilang naik menjadi 30 persen dari kurang dari 10 persen sebelum penerapan sistem.

Saat barang yang hilang dikembalikan, pekerja transportasi atau pekerja lain mengambil gambar barang tersebut menggunakan tablet mereka.

Sistem berbasis AI Find kemudian mencatat warna, bentuk, dan fitur lain dari barang tersebut sebelum menyimpan informasi beserta foto-fotonya ke basis data.

Melalui aplikasi perpesanan seperti Line, pemilik barang yang hilang dapat mengajukan pertanyaan dengan memasukkan informasi terkait seperti lokasi hilangnya barang, fitur,

dan fotonya.

Jika tidak ada foto, pemilik dapat memilih gambar yang mirip, dan sistem akan memberi tahu jika menemukan gambar yang cocok.

Layanan pencarian barang hilang ini tersedia dalam bahasa Jepang, Inggris, Mandarin, dan Korea.

Staf Find menelusuri basis data menggunakan kecerdasan buatan berdasarkan informasi yang dimasukkan oleh pemilik barang hilang.

Bahkan jika orang yang kehilangan tidak memberikan foto atau hanya memberikan deskripsi samar tentang barang yang hilang, AI akan menunjukkan beberapa kandidat yang mungkin dalam urutan probabilitas menurun.

Jika AI menentukan bahwa barang tersebut memang milik orang yang dimaksud, AI akan mengarahkan mereka ke loket stasiun atau fasilitas untuk mengambilnya.

Yurikamome Inc., operator layanan transit monorel otomatis antara Shimbashi dan Toyosu di kawasan tepi laut Tokyo, memperkenalkan sistem AI pada Juli 2024.

Perusahaan menangani sekitar 15000 barang hilang dan ditemukan setiap tahun menurut Kiyomichi Mano, seorang pejabat di Stasiun Shimbashi jalur transit tersebut.

Yurikamome Inc. hingga akhir Maret secara akumulatif telah menangani total sekitar 1,5 juta barang yang hilang, dan sekitar 480.000 di antaranya sudah dikembalikan. (nei,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"

PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI

OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)

PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)

PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)

REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)

REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)

download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com

VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG:** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL.

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Gunakan Bahan Alami Ini untuk Basmi Rayap

Salah satu tantangan dalam memiliki lemari kayu di rumah adalah melindunginya dari serangan rayap. Serangga ini mengonsumsi kayu sebagai sumber makanannya, sehingga dapat merusak berbagai furnitur berbahan kayu, termasuk lemari.

Menurut penjelasan di laman WebMD, rayap hanya dapat bertahan hidup di tempat yang gelap dan lembap karena mereka menghindari paparan udara. Inilah alasan mereka cenderung membentuk koloni di dalam lemari kayu yang tertutup.

Sebenarnya, kerusakan akibat rayap tidak terjadi dengan cepat. Biasanya butuh waktu 3 hingga 8 tahun untuk melihat kerusakannya, karena hama ini memakan serat kayu dari dalam ke luar. Itulah mengapa banyak yang tidak sadar sampai kerusakannya benar-benar parah.

Untuk mengatasinya, kamu bisa gunakan bahan-bahan pembasmi yang direkomendasikan dalam laman Hi Care dan U.S Pest Protection berikut ini:

Minyak Jeruk

Minyak jeruk terbuat dari d-limonene yang mematikan bagi rayap. Meskipun jarang ditemukan, tapi minyak ini banyak dijual di e-commerce dalam negeri. Minyak jeruk dapat membunuh dan mencegah rayap merusak lemari maupun furnitur kayu lainnya di rumahmu. Cukup semprotkan secara langsung ke rayap atau di area yang kamu curigai sebagai tempat bersarangnya hama itu.

Cuka

Cuka sama ampuhnya dengan minyak jeruk untuk membunuh rayap. Agar kekuatannya makin maksimal, campurkan cuka dengan perasan lemon secukupnya. Pastikan larutan cuka lebih banyak dibandingkan lemon, ya. Kemudian tuangkan larutan tersebut ke dalam botol sprayer lalu semprotkan ke seluruh lemari. Keasaman cuka dan lemon akan langsung membunuh rayap dan mencegahnya muncul lagi.

Aloe Vera atau Petroleum Jelly

Bukan hanya bahan-bahan asam yang dapat membunuh rayap, tapi aloe vera atau petroleum jelly juga bisa. Kandungan fenol yang ada di dalam bahan alami tersebut dapat membuat rayap mati lemas. Cukup oleskan aloe vera atau petroleum jelly ke area yang kemungkinan besar jadi hunian rayap.

Garam

Garam yang tersedia di dapur rumahmu juga dapat digunakan untuk membasmi rayap, lho. Cukup campurkan garam dan air lalu masukkan larutannya ke dalam botol sprayer. Semprotkan larutan garam ke area yang dihinggapi rayap. Bahan alami ini akan membuat rayap kering hingga akhirnya mati.

Asam Borat

Asam borat atau yang lebih dikenal dengan nama boraks termasuk alat pengendali hama yang ampuh. Bukan hanya rayap yang dapat dibasmi oleh asam ini, tapi juga semut, kutu, dan kecoak. Cukup taburkan bubuk asam borat di dalam lemariimu. Bubuk itu akan merusak sistem saraf rayap sampai akhirnya hama itu mati.

Nematoda Parasit

Cara membasmi rayap kayu secara alami adalah menggunakan nematoda parasit. Mendapatkan bahan pembasmi rayap ini bisa dibeli pada pembibit lokal maupun secara online melalui toko online atau marketplace. Nematoda parasit sebagai cara membasmi rayap kayu secara alami ini berupa cacing kecil yang menggali larva rayap dan membunuhnya dalam waktu dua hari.

Aroma Terapi

Cara membasmi rayap kayu secara alami adalah memanfaatkan aroma terapi yang tidak disukai rayap. Jenis yang tidak disukai rayap adalah j e r u k ,

lavender dan eukaliptus. Terapkan pada sudut-sudut kayu atau ruang agar rayap tidak kembali.

Solar

Cara membasmi rayap kayu secara alami adalah menggunakan solar. Ini karena solar dikenal sebagai bahan yang bisa membuat kayu menjadi lebih awet, termasuk melindunginya dari rayap. Penerapannya, sebelum kayu dijadikan karya seni atau bahan dalam membuat bangunan, kayu akan dilapisi dengan solar, lalu dibiarkan hingga beberapa hari. Setelah cukup meresap dan melapisi seluruh bagian kayu, baru setelah itu kayu yang sudah diberi lapisan solar siap digunakan.

Kapur Barus

Cara membasmi rayap kayu secara alami adalah menggunakan kapur barus. Kapur barus memiliki kandungan naftalena yang menjadikannya cara membasmi rayap kayu secara alami yang ampuh. Aromanya pun tidak disukai rayap. Cobalah cara membasmi rayap kayu secara alami dengan meletakkan kapur barus di sudut-sudut rumah atau di perabotan kayu.

Untuk menghindari kerugian akibat rayap, ada beberapa langkah preventif yang dapat dilakukan:

Menjaga Kebersihan dan Kelembapan Rumah

Rayap sangat menyukai lingkungan lembap. Pastikan rumah memiliki ventilasi yang baik dan segera perbaiki kebocoran air yang bisa menciptakan kondisi ideal bagi rayap untuk berkembang biak.

Menggunakan Kayu yang Sudah Diolah dengan Anti-Rayap

Jika menggunakan material kayu, pastikan kayu tersebut telah diolah dengan bahan pelindung anti-rayap. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan kayu menjadi sasaran rayap.

Melakukan Inspeksi Rutin

Inspeksi berkala oleh profesional sangat disarankan untuk mendeteksi tanda-tanda awal infestasi rayap sebelum mereka menyebabkan kerusakan serius.

Menggunakan Metode Pengendalian Rayap yang Tepat

Jika sudah menemukan tanda-tanda infestasi rayap, penting untuk segera mengambil langkah yang efektif. Metode seperti sistem injeksi anti-rayap yang dapat menjadi solusi dalam membasmi rayap tanpa merusak struktur bangunan.

Saat menghadapi ancaman rayap, tindakan pencegahan lebih baik daripada perbaikan. Menggunakan teknologi pengendalian hama yang ramah lingkungan dan inspeksi rutin dapat membantu menjaga properti tetap aman dari serangan rayap. (nei,ist/dya)



Bos Sritex (dari Hal 1)...

Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Komisaris Utama (Komut) Sritex Iwan Setiawan Lukminto di Jakarta pada Rabu (21/5/2025). Penyidik menangkap Iwan Lukminto di Solo pada Selasa (20/5/2025) malam.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan bos Sritex itu diperiksa soal dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit dari sejumlah bank. Dia diperiksa di Kantor Kejagung sejak Rabu pagi pukul 08.00 WIB. "Kalau kami lihat nilainya sekitar Rp 3,6 triliun. Itu di beberapa bank," kata Harli di Kantor Kejagung, Rabu (21/5/2025).

Dia menangkap alasan mengapa penyidik Jaks Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) menangkap Iwan di rumahnya. "Jadi penyidik melakukan antisipasi, ada kekhawatiran, jangan sampai yang bersangkutan ini melarikan diri," kata Harli.

Menurut Harli, penyidik Kejagung masih melakukan pemeriksaan intensif dan belum ada kepastian apakah Iwan akan ditahan.

Dalam kasus tindak pidana korupsi pemberian kredit dari sejumlah bank kepada Sritex ini, penyidik Kejagung belum menetapkan tersangka. "Itu yang sedang dicari. Makanya berbagai pihak diminta kesaksiannya untuk menggali apakah ada perbuatan melawan hukum di sana atau juga kerugian negara," kata Harli Siregar pada 14 Mei 2025.

Pada perkara ini, ada sejumlah bank yang memberikan kredit kepada Sritex, seperti PT Bank Negara Indonesia (BNI), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB), PT Bank DKI, dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Kejagung telah menyidik kasus ini sejak 2024. Hal itu mengacu pada surat perintah penyidikan nomor Print-62/F./2/Fd/2/10/2024.

Jampidsus juga telah mengeluarkan surat penyidikan kedua pada 20 Maret 2025. Hal tertulis dalam dokumen surat panggilan saksi atas nama Yefta Bagus Setiawan. Dia adalah Manajer Accounting di PT Senang Kharisma Textile (Sritex Group). Kejagung juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah bank daerah penyalur kredit.

Alasan jaksa menyidik kasus ini karena pemberi kredit adalah bank pemerintah. Jaksa tengah menelusuri apakah kredit diberikan saat kondisi keuangan Sritex dalam kondisi baik atau sebaliknya.

Ada Indikasi TPPU?

Tim Kurator Sritex telah menetapkan daftar piutang tetap pada 30 Januari 2025. Total uang Sritex

sebesar Rp 29,8 triliun dari 1.654 kreditur separatis, preferen, dan konkuren. Namun, dari jumlah itu Sritex memiliki utang total Rp 4,2 triliun ke bank milik negara. Secara terperinci, Sritex memiliki utang sebesar Rp 2,9 ke PT Bank Negara Indonesia atau BNI, Rp 611 miliar ke PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Rp 185 miliar ke PT Bank DKI, dan Rp 502 miliar ke PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

Sebelumnya, dikabarkan Badan Reserse Kriminal Polri juga sempat mengusut kasus yang sama. Setelah Sritex dinyatakan pailit pada 21 Oktober 2024, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI mengusut dugaan tindak pidana berupa penyelewengan penyaluran kredit ke perusahaan tekstil tersebut. Dalam warakat yang dilihat Tempo, polisi pun telah memeriksa pimpinan Bank Permata dan Bank Muamalat selaku kreditur Sritex dengan surat bernomor B/Und-2190/XI/RES.1.9./2024/Dittipideksus tertanggal 26 November 2024 atas laporan informasi bernomor R/LI/157/X/RES.1.9./2024/Dittipid eksus tertanggal 30 Oktober 2024.

Saat itu polisi menduga tindak pidana ini melanggar pasal 372 KUHP dan/atau pasal 263 KUHP dan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Polisi menduga dalam permohonan dan pencairan fasilitas kredit serta pembiayaan bank, Sritex menggunakan dokumen palsu, menggelembungkan nilai piutang, mengagunkan aset secara berganda, menggunakan utang tidak sesuai dengan peruntukannya, hingga melakukan pencucian uang atas pencairan kredit tersebut. Sritex diduga merugikan bank dan pemberi pinjaman lain senilai Rp 19,963 triliun.

Tahun lalu, Sritex telah dinyatakan pailit dan resmi tutup per Sabtu, 1 Maret 2025. Saat ini, seluruh asetnya telah dikuasai oleh kurator pailit. Namun demikian pemerintah masih berupaya mencari skema agar perusahaan bisa beroperasi kembali agar pegawai mereka dapat bekerja kembali dan tidak ada PHK massal.

Tuntutan Eks Karyawan

Tim advokasi eks pekerja PT Sri Rejeki Isman atau Sritex Tbk memastikan penangkapan eks Komisaris Utama Sritex, Iwan Setiawan Lukminto, oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak berpengaruh pada upaya 8.475 eks buruh menuntut hak-hak mereka.

Salah satu pengacara dari tim advokasi eks pekerja Sritex, Machasin Rochman, menjelaskan Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang pada

Oktober 2024 dan berhenti beroperasi pada 1 Maret 2025. Secara legal, pengelolaan dan pemberesan aset Sritex kini menjadi wewenang tim kurator.

"Meski ada kasus itu [penangkapan Iwan Setiawan Lukminto], tidak mengganggu proses tuntutan hak-hak eks karyawan Sritex yang harus dibayarkan. Proses terus berjalan. Kami juga berkomunikasi dengan tim kurator yang menangani kepailitan Sritex," kata, Rabu (21/5/2025).

Tim advokasi eks pekerja Sritex telah melakukan pertemuan dengan kurator pada Senin (19/5/2025) di Solo. Mereka meminta agar hak-hak 8.475 eks pekerja Sritex segera dibayarkan. Total nominal hak-hak eks pekerja Sritex yang seharusnya dibayarkan mencapai Rp337 miliar.

Ada empat hak yang dituntut para eks pekerja Sritex, yakni pesangon senilai Rp331.202.110.421, uang tunjangan hari raya (THR) senilai Rp24.036.541.754. Kemudian, pemotongan uang gaji pekerja pada Februari 2025 berupa uang simpanan koperasi dan uang angsuran pinjaman sebagai pekerja senilai Rp994.857.000.

Terakhir, uang pemotongan gaji Februari untuk pembayaran dana BPJS senilai Rp779.163.025. "Hak-hak eks pekerja Sritex harus didahulukan dan menjadi prioritas utama untuk dibayarkan oleh kurator," ujar dia. (din,wid,ist,rls,ant,tmo/dya)

3 Orang Resmi Jadi Tersangka Korupsi Pemberian Kredit

KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menetapkan Komisaris Utama sekaligus eks Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman TBK atau Sritex, Iwan Setiawan Lukminto sebagai tersangka kasus korupsi kredit dari PT Bank Jabar Banten (BJB) dan PT Bank DKI Jakarta terhadap Sritex.

Selain Iwan, Kejagung juga menetapkan eks Direktur Utama Bank DKI berinisial YM dan pimpinan Divisi Korporasi dan Komersial BJB berinisial DS sebagai tersangka dalam kasus ini.

"Pada hari ini Rabu tanggal 21 Mei tahun 2025 penyidik pada Jampidsus Kejaksaan Agung Republik Indoneis menetapkan 3 orang tersebut sebagai tersangka karena ditemukan alat bukti yang cukup," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar, Rabu (21/5/2025).

Qohar menjelaskan, dalam perkara ini, YM dan DS diduga memberikan kredit kepada PT Sritex secara melawan hukum karena tidak didasari analisa yang memadai dan tidak menaati prosedur serta persyaratan yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Iwan justru tidak menggunakan dana kredit dari BJB dan Bank DKI sebagaimana tujuan

pemberian kredit yaitu untuk modal kerja."Tetapi disalahgunakan untuk membayar utang danembali aset nonproduktif sehingga tidak sesuai dengan peruntukkan sebenarnnya," kata Qohar.

Atas perbuatan para tersangka, Kejagung menaksir dugaan kerugian dalam perkara ini mencapai Rp 692.980.592.188.

Bahkan, dalam pemeriksaan sebelumnya, Penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap 46 saksi dan 9 saksi lainnya. "Kemudian juga beberapa saat yang lalu, Penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 orang ahli. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi tersebut di atas, Penyidik memperoleh alat bukti yang cukup," ungkap Abdul Qohar.

Dikatakan, dalam pemberian kredit kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk, ZM selaku direktur utama PT Bank DKI dan DS selaku pimpinan divisi korporasi dan komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten telah memberikan kredit secara melawan hukum karena tidak melakukan analisa yang memadai dan mentaati prosedur serta persyaratan yang telah ditetapkan.

Dia menerangkan, terhadap

tersangka DS, tersangka JM, dan tersangka ISL disangka telah melanggar pasal dua ayat satu atau pasal tiga juncto pasal delapan belas undang-undang nomor 31 tahun 1799 tentang pemberian tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat satu ke satu kitab undang-undang hukum pidana. (wid, ktn, ist, dya)

SEBAGIAN TUMPUKAN UTANG SRITEX

Bank Jateng
RP 395.663.215.800,00

Bank BJB
Rp 543.980.507.170,00

Bank DKI
Rp 149.785.0018,57

Bank Sindikasi*
Rp 2.500.000.000.000

(*gabungan beberapa bank)



Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana (kanan) bersama Kepala Badan POM Taruna Ikrar (kiri) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/5/2025). Ist

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan 17 kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah hingga 20 Mei 2025. BPOM meminta tambahan anggaran jumbo senilai Rp2,69 triliun untuk mendukung program unggulan Presiden Prabowo ini.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan kasus keracunan terjadi di 10 provinsi. "Ada 17 kasus keracunan dan sebetulnya ada 8 kasus non-keracunan. Apa bedanya? Tentu artinya kasus itu yang berdampak berdasarkan hasil telusuran setelah terjadi kejadian," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, Rabu (20/5/2025).

Berdasarkan hasil penelusuran BPOM, temuan 17 kasus keracunan mayoritas terjadi di Jawa Barat (Jabar). Rinciannya, Jawa Barat 5 kasus, Jawa Tengah 3 kasus, Sumatera Selatan 2 kasus, Banten 1 kasus.

Dari 17 kasus tersebut, BPOM menemukan faktor penyebab keracunan dalam MBG di antaranya bahan pangan yang terkontaminasi. Sumber kontaminasinya dari air pencucian, lingkungan pengolahan, hingga petugas penjamah makanan.

Taruna Ikrar menyampaikan, penyebab utama keracunan, menurutnya, adalah karena adanya kontaminasi pada bahan baku makanan.

"Pertama terjadi kontaminasi awal bahan pangan," kata Ikrar.

Ia menjelaskan, kontaminasi tersebut dipicu oleh beberapa faktor, termasuk penggunaan bahan baku yang tidak higienis, proses pencucian yang tidak steril, serta lingkungan pengolahan makanan yang tidak bersih.

"Kami temukan itu sumber

kontaminasi bahan mentahnya, air bakunya, pencucian, lingkungan pengolahannya makanan kurang steril," tambahnya.

Selain itu, BPOM juga mencatat adanya pertumbuhan bakteri akibat kesalahan dalam penyimpanan bahan makanan dan pengendalian suhu di dapur produksi MBG.

"Ada (kesalahan) pengendalian suhu dan waktu, muncul beberapa bakteri yang bisa tumbuh karena penyimpanan belum tepat, kondisi makanan dan pengolahan makanan," kata Ikrar lagi.

Banyaknya kasus keracunan dalam pelaksanaan program MBG menimbulkan kekhawatiran publik dan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaannya.

Lebih lanjut, Taruna juga

TEMUKAN 17 KASUS KERACUNAN MBG, BPOM MINTA ANGGARAN JUMBO

menyoroti buruknya kondisi sanitasi dan higienitas sebagai penyebab tambahan dalam sejumlah kasus keracunan makanan di lapangan.

"Dan penyebab terakhir dari 17 kasus itu ada kegagalan pengendalian keamanan pangan yang hubungannya dengan higienis dan sanitasi. Kemudian pengendalian suhu, praktek penanganan makan, serta pengawasan dan monitoring yang tidak tepat," katanya.

Taruna mengatakan kehadiran pihaknya hingga Badan Gizi Nasional (BGN) di DPR RI bukan itu saling menyalahkan. Menurut dia, perlu ada langkah yang konkret terkait kasus keracunan ini.

"Kami jelaskan bahwa kita belajar, jadi seperti yang bapak pimpinan sebutkan tadi, kita bukan mau saling menyalahkan di sini. Kita mau cari masalahnya di mana dan kita carikan jalan keluarnya," ujar Taruna.

BPOM meminta tambahan anggaran

senilai Rp2,69 triliun untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Taruna Ikrar mengatakan tambahan dana jumbo itu telah diusulkan BPOM kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas pada 6 Januari 2025. Adapun, usulan ini mencakup 13 kegiatan MBG pengawasan MBG oleh BPOM.

Taruna menyebut kebutuhan anggaran ini lantaran BPOM berkontribusi melalui indikator jumlah sampel makan bergizi yang diuji sesuai standar.

"Pada 6 Januari, usulan kami tentang kontribusi kepada Menteri Keuangan. Tentu ini berbicara tentang anggaran, Badan POM berkontribusi melalui indikator jumlah sampel, dan kami juga telah menjelaskan tentang kebutuhan anggaran untuk 13 kegiatan MBG," kata Taruna. (wid,din,rls,kum/dya)

Dikritik! Food Tray Impor dari China

ANGGOTA Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem Nurhadi menyinggung ribuan wadah atau food tray menu Makan Bergizi Gratis (MBG) diimpor dari China. Ia menyayangkan food tray yang dipakai dalam program MBG bukan berasal dari lokal.

Hal itu disampaikan Nurhadi dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IX dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan BPOM di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/5/2025). Nurhadi memahami food tray buatan lokal memang berbeda harga dibandingkan dengan buatan China.

"Saya mendengar ini ribuan kontainer yang berisi food tray itu datang dari China, Pak. Memang kita akui produk-produk lokal ini pasti kalah dengan kaitannya dengan harga ya," kata Nurhadi.

"Pemerintah China ini luar biasa, jadi kalau ada home industry yang melakukan ekspor, pemerintah China

ini melakukan kebijakan yang namanya subsidi. Jadi bagaimanapun, kita pasti kalah harga," lanjutnya.

Nurhadi meminta BGN tidak sekadar melihat harga, tapi juga kualitas. Menurutnya, produk industri dalam negeri sudah memenuhi standar kesehatan dan terjamin aman digunakan.

"Ini kami mendorong, kalau melihat industri peralatan dapur, dalam negeri saat ini yang sudah mampu memproduksi alat-alat yang memenuhi standar kesehatan, mulai panci, wajan, alat potong, termasuk food tray sendiri dan aman digunakan," tambahnya.

Nurhadi mendorong BGN mengedepankan produk lokal untuk pelaksanaan MBG. Menurutnya, selain produk mudah diawasi, UMKM dalam negeri pun mendapat manfaatnya.

"Nah, saya kira ini lebih mudah diawasi, Pak, dari sisi kualitas bahan dan proses produksinya. Jika MBG

menggunakan produk lokal, selain mengurangi kontaminasi dan mengurangi risiko keracunan, kita juga bisa memberi ruang bagi UMKM untuk bisa bertumbuh kembang," kata Nurhadi.

Nurhadi lalu mengungkap adanya laporan kalau material food tray dari China dipalsukan untuk menyamai kualitas stainless steel asli. Menurutnya, hal itu sangat berisiko bagi kesehatan.

"Termasuk ini ada indikasi food tray yang melakukan semacam pemalsuan. Jadi mereka itu kayak disemprot bahan tertentu sehingga yang sebenarnya kandungannya itu besinya lebih banyak, tapi setelah disemprot itu jadi terkesan kayak stainless steel. Tapi setelah beberapa bulan kemudian, itu bisa luntur dan bisa membaaur ke makanan dan membuat risiko keracunan muncul," imbuhnya. (wid,din,ist/dya)